



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 5 Januari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI MANADO

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **SINJO JULIANUS MARAMIS**
2. Jabatan : **HAKIM TINGGI**
3. NHK : **33457**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 1.131.700.000

1. Tanah Seluas 37.500 m2 di KAB / KOTA MINAHASA, WARISAN
Rp. 75.000.000
2. Tanah Seluas 40.000 m2 di KAB / KOTA MINAHASA, HIBAH
TANPA AKTA Rp. 340.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 196 m2/36 m2 di KAB / KOTA KOTA
MANADO , HASIL SENDIRI Rp. 82.700.000
4. Tanah Seluas 560 m2 di KAB / KOTA KOTA MANADO , HASIL
SENDIRI Rp. 159.000.000
5. Tanah Seluas 15.000 m2 di KAB / KOTA KOTA MANADO , HASIL
SENDIRI Rp. 75.000.000
6. Tanah Seluas 5.000 m2 di KAB / KOTA KOTA MANADO , HASIL
SENDIRI Rp. 25.000.000
7. Tanah Seluas 40.000 m2 di KAB / KOTA KOTA MANADO , HASIL
SENDIRI Rp. 200.000.000
8. Tanah Seluas 40.000 m2 di KAB / KOTA KOTA MANADO , HASIL
SENDIRI Rp. 140.000.000
9. Tanah Seluas 10.000 m2 di KAB / KOTA KOTA MANADO , HASIL
SENDIRI Rp. 35.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 135.000.000

1. MOBIL, KIJANG MINIBUS LGX Tahun 2004, HASIL SENDIRI Rp.
60.000.000



2. MOBIL, TOYOTA VIOS Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp.
75.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	92.300.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	256.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.615.000.000
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.615.000.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.